

PEMBERITAAN MEDIA



LULUK'S UPDATE

EDISI

24 Februari – 1 Maret 2020

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*



Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021

**Pemerintah
mendorong
pembangunan di
sektor industri,
pariwisata dan
investasi**

**Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan Bappenas**

Pemerintah mendorong pembangunan di sektor industri, pariwisata dan investasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.

Proyek prioritas strategis (major projects) diarahkan untuk mendukung pengembangan di ketiga sektor tersebut.

Major projects adalah 10 destinasi pariwisata prioritas yang bisa menjadi faktor peningkatan di sektor pariwisata. Bappenas juga mendorong pembangunan di sektor industri. Termasuk pembangunan smelter. Ketiga, pembangunan untuk mendukung iklim investasi di Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021

**Pemerintah
mendorong
pembangunan di
sektor industri,
pariwisata dan
investasi**

Leonard VH. Tampubolon, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas

Pendanaan RKP 2021 diarahkan untuk pencapaian sasaran pembangunan sesuai tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 di tahun 2021.

Rencana pendanaan major project pada 2020 - 2024 sebanyak Rp 6.555,8 triliun.

Jumlah ini berasal dari belanja Kementerian/Lembaga sebanyak Rp 1.185,5 triliun, DAK/dukungan pemerintah daerah sebanyak Rp 412,9 triliun, KPBU/BUMN/swasta Rp 4.814,9 triliun dan subsidi/public service obligation (PSO) sebanyak Rp 142,5 triliun.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021

**Pemerintah
mendorong
pembangunan di
sektor industri,
pariwisata dan
investasi**

**Josaphat Rizal Primana, Staf Ahli Kepala
Bappenas Bidang Bidang Pembangunan
Sektor Unggulan dan Infrastruktur**

Terkait perkembangan 10 metropolitan baru, saat ini tengah mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan pengembangan 10 metropolitan baru.

Tidak hanya itu, juga akan terus mendorong skema pembiayaan infrastruktur non anggaran atau KPBU dalam membangun infrastruktur ke depannya.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021

Pemerintah
mendorong
pembangunan di
sektor industri,
pariwisata dan
investasi

Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas

Bappenas mendorong pembangunan sektor industri manufaktur, terutama untuk meningkatkan nilai tambah.

"Sekarang ini kontribusi dari industri manufaktur kita rendah di bawah 20%, sehingga kita tidak masuk kategori negara semi industri. Sementara kita ingin loncat ke 4.0 aneh kalau kita tidak ada perbaikan di sektor industri manufaktur ini"

Tidak hanya itu, perlu adanya prioritas pengembangan di sektor lain seperti pengembangan bidang farmasi.

"Kita harus memilih industri di sektor mana yang bisa dorong menjadi lokomotif, apakah industri farmasi, industri turunan ke 2 dari cpo, industri pertambangan seperti smelter. Kemudian kita juga loncat ke (industri) jasa. Jadi termasuk di bidang farmasi juga akan didorong oleh pemerintah"

Emisi Karbon

Tekan Emisi Karbon, Bappenas Dorong Swasta Bisnis Daur Ulang Sampah

Arifin Rudianto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Bappenas

- Untuk menekan emisi gas karbon ke angka 27% pada tahun 2024, Bappenas akan mendorong swasta mengembangkan industri daur ulang berbasis sampah.
- Saat ini tengah menyusun ekosistem bisnis tersebut
- Pemerintah akan menggandeng negara lain seperti Denmark
- Aktornya swasta, pemerintah sebagai mediator, fasilitator, dan inisiator.

Suharso Monoarfa, Menteri Bappenas

- langkah ini membuka peluang ekonomi baru. Sampah daur ulang seperti limbah B3 dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi tinggi.
- Implementasi dari sirkulasi ekonomi dapat memperpanjang masa penggunaan produk dan membawa keuntungan yang berkelanjutan.

Tekan Emisi Karbon, Bappenas Dorong Swasta Bisnis Daur Ulang Sampah

- Berdasarkan data Climate Accountability Institute (CAI), pada akhir tahun 2019, ada 20 perusahaan energi yang dianggap bertanggung jawab terhadap emisi global.
- Total 20 perusahaan tercatat menyumbang 480.168 MtCO₂e (35,45 persen dari total emisi global)
- Periode penghitungan emisi dilakukan mulai 1965 hingga 2017. Seluruh emisi global yang terhitung sejak 1965 hingga 2017 sebesar 1.354.388 MtCO₂e.
- Perusahaan Arab Saudi, Saudi Aramco, menyumbang emisi paling tinggi yakni 59.262 MtCO₂e, setara 4,38% emisi global.
- Raksasa migas asal AS, Chevron menyumbang 43.345 MtCO₂e setara 3,2 persen emisi global.
- Raksasa migas Gazprom dari Rusia menyumbang 43.230 MtCO₂e atau dan 3,19 persen emisi global.

Restorasi Gambut

BRG fasilitasi restorasi 656.884 ha gambut di Sumsel

- ❑ BRG sejak 2017 hingga 2020 memfasilitasi pemulihan atau restorasi 656.884 ha lahan gambut di wilayah Sumatera Selatan
- ❑ Sumatera Selatan masuk 7 provinsi penting dalam upaya untuk penyelamatan lahan gambut karena terdapat 656 ribu ha lahan gambut rusak.
- ❑ Lahan tersebut terdiri atas:
 - ❑ kawasan budidaya berizin setelah kebakaran 2015-2017 dengan status lahan HGU 19.678 ha, IUPHH 158.143 ha,
 - ❑ kawasan budidaya tidak berizin APL 42.050 ha, hutan 28.163 ha, kawasan lindung HL 1.941 ha dan KK 39.330 ha.
 - ❑ kawasan budidaya berizin gambut lindung berkanal status HGU 91.503 ha, IUPHH 258.416 hektare, kawasan lindung HL 5.735 ha, dan KK 5.504 ha.

BRG fasilitasi restorasi 656.884 ha gambut di Sumsel

- Untuk lahan yang berada di kawasan perkebunan rakyat, restorasi difasilitasi BRG sedangkan yang berada di areal konsesi atau izin pengelolaannya dikuasai perusahaan dikoordinasikan dengan mitra (perusahaan bersangkutan).
- Hingga saat ini BRG menjalankan program restorasi gambut di 3 kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin.

Omnibus Law

Omnibus Law dan Karhutla

**Pemegang
konsesi
diwajibkan cegah
kawasan
konsesinya dari
karhutla**

Ilyas Asaad, Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Legislasi, Legal, dan Advokasi

- Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja mengatur bahwa perusahaan pemegang izin tetap konsesi berkewajiban menjaga dan mencegah kawasan konsesinya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
- 'Pernyataan ini untuk menjawab pertanyaan, bahwa pasal 49 dalam UU Kehutanan tidak dicabut dalam penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tapi diubah dengan mewajibkan korporasi melakukan pencegahan karhutla di kawasan konsesinya
- RUU Omnibus Law Cipta Kerja semangatnya untuk penyederhanaan regulasi, sehingga aturan dalam satu pasal bukan berarti menghilangkan norma hukum secara keseluruhan, tapi pasal 49 tidak terlepas dari pasal 50 dan pasal 78 dalam UU yang sama.

Omnibus Law dan Karhutla

**Pemegang
konsesi
diwajibkan cegah
kawasan
konsesinya dari
karhutla**

Ilyas Asaad, Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Legislasi, Legal, dan Advokasi

- ❑ Perubahan pada pasal 49 dari "bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran" menjadi "wajib melakukan pencegahan dan pengendalian" harus dilihat kaitannya dengan pasal 50 yang telah mengatur larangan membakar, bahkan sanksi pidana bagi pembakar juga diatur dalam pasal 78 ayat 2 dan ayat 3. Dengan demikian, larangan membakar menjadi lebih luas bukan hanya bagi pemegang izin.
- ❑ Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga dibedakan antara sengaja dan lalai. Tanggung jawab perusahaan dalam karhutla justru makin berat, yakni dilarang membakar juga wajib melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Jadi, membaca RUU Omnibus Law ini harus secara utuh, karena antara pasal per pasal saling berkaitan.

Omnibus Law dan Karhutla

**Pemegang
konsesi
diwajibkan cegah
kawasan
konsesinya dari
karhutla**

**Ilyas Asaad, Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Legislasi,
Legal, dan Advokasi**

- ❑ Pasca-karhutla 2015, Kementerian LHK telah melakukan berbagai langkah korektif pengawasan pada perusahaan secara ketat, terutama pada lahan gambut. Langkah korektif itu seperti pembuatan dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut. Ini juga bagian dari upaya holistik pencegahan karhutla di areal konsesi
- ❑ RUU Omnibus Law Cipta Kerja diperkuat lagi penegasan tentang pencegahan, menjadi tanggung jawab perusahaan. Konsesi hutan tanaman industri (HTI), juga diperintahkan untuk melakukan kontrol dan menjaga karhutla hingga radius 2-5 km di luar batas konsesinya.
- ❑ Penegakan hukum lingkungan terhadap perusahaan, bukan untuk mengejar kesalahan, tapi memberi efek jera sekaligus melakukan pembinaan.

Omnibus Law bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

**Penyampaian Menteri
LHK Siti Nurbaya dalam
Rakernas KLHK 27-28
Februari 2020 terkait
Omnibus Law**

Poin penting dalam RUU Omnibus Law bidang LHK adalah penerapan standard dalam pengendalian dampak lingkungan pada perizinan berusaha.

Perizinan berusaha yang mencakup lingkungan dalam Omnibus Law berbasis pendekatan resiko akan didekati dengan standard. Ini memudahkan perizinan berusaha dan memaksa pemerintah/birokrasi bekerja baik dalam pengawasan dengan integritas yang tinggi.

Omnibus Law membagi resiko menjadi resiko tinggi, sedang dan rendah. Setiap resiko akan dibuatkan standard yang dimaksud. Untuk resiko tinggi wajib dilakukan AMDAL, resiko sedang dikelola melalui Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) yang menjadi standard dan resiko rendah dilakukan dengan sistem registrasi melalui standard sebagai alat kontrol.

Omnibus Law bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

Penyampaian Menteri
LHK Siti Nurbaya dalam
Rakernas KLHK 27-28
Februari 2020 terkait
Omnibus Law

"KLHK menyiapkan standard tersebut bersama sektor-sektor yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Dari sinilah nanti dilakukan enforcement (penegakan). Contohnya dalam penanganan sampah dan limbah B3, disiapkan standart pemerintah"

"Standard pemerintah wajib diikuti oleh daerah. Standard menjadi instrumen untuk pengawasan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan reguler maupun inprompto (pengawasan dilakukan antara lain karena adanya pengaduan masyarakat) Dengan begini pengawasan dan penegakan hukum tentu akan jadi lebih kuat"

Menteri Siti Nurbaya dalam Rakernas KLHK, Jumat 28 Februari 2020 di Yogyakarta.

Omnibus Law bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

**Penyampaian Menteri
LHK Siti Nurbaya dalam
Rakernas KLHK 27-28
Februari 2020 terkait
Omnibus Law**

Semangat Omnibus Law Cipta Kerja adalah penyederhanaan regulasi dalam bentuk satu perizinan berusaha. Nantinya tidak perlu lagi mengurus banyak izin untuk memulai suatu usaha. Kuncinya ada pada standard yang jadi pedoman bersama para pihak.

Ini tidak terlepas dari upaya untuk memperbaiki prosedur dan pelayanan publik. Untuk aktualisasi reformasi birokrasi yang menuntut perlunya standar pengelolaan lingkungan per-kegiatan usaha, bukan berdasarkan pendekatan dokumen izin.

Ini menyederhanakan prosedur atau birokrasi perizinan lingkungan. Manfaatnya menciptakan transparansi dan kepastian dalam penyelesaian perizinan berusaha, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Omnibus Law bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

Penyampaian Menteri
LHK Siti Nurbaya dalam
Rakernas KLHK 27-28
Februari 2020 terkait
Omnibus Law

Perlu penyesuaian fungsi salah satu eselon 1 di KLHK yang merupakan badan transformasi dari badan litbang dan inovasi menjadi badan yang mengatur standart dan melakukan pengendalian penerapan standart, sehingga di daerah tidak lagi memiliki standart yang berbeda-beda.

Pengawasan lingkungan dalam berusaha akan bisa efektif dilakukan. Pelanggaran standart merupakan pelanggaran dan ada konsekuensi yang diatur rinci dalam PP.

"Hal ini sejalan dengan tujuan omnibus law untuk penyederhanaan birokrasi dan meningkatkan pengawasan tanpa mengorbankan lingkungan. Ini kaitannya dengan semangat RUU Omnibus Law secara praktek. Karna Omnibus Law banyak mengedepankan standart, konsep kuatnya di pengawasan dan pembinaan. Jadi arahnya diawasi dan dibina, bukan dibinasakan,"

Omnibus Law bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

Pakar hukum
Universitas
Parahyangan Prof.Asep
Warlan Yusuf

RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang LHK pada prinsipnya tidak mengalami perubahan. Khususnya perubahan pasal pada UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Prinsipnya norma lingkungan tidak ada yang berubah. Kebijakan memang ada yang berubah, teknis sebagian ada yang berubah, dan untuk prosedur memang banyak berubah menjadi lebih sederhana

Omnibus Law bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

Pakar hukum
Universitas
Parahyangan Prof.Asep
Warlan Yusuf

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian, saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi di pusat dan daerah, karena terdapat 43.511 peraturan saling tumpang tindih.

Penerapan metode Omnibus Law memiliki banyak kelebihan untuk menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia.

Kelebihan tersebut antara lain dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien.

Selain itu mampu menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi.

Sumber Pemberitaan

- <https://katadata.co.id/berita/2020/02/24/tekan-emisi-karbon-bappenas-dorong-swasta-bisnis-daur-ulang-sampah>
- <https://www.antaraneews.com/berita/1327210/brg-fasilitas-restorasi-656884-ha-gambut-di-sumsel>
- http://rri.co.id/post/berita/793637/nasional/kumpulkan_jajaran_pusat_dan_daerah_menteri_lhk_sosialisasi_ruu_cipta_kerja.html
- <https://mediaindonesia.com/read/detail/293230-klhk-fokus-rehabilitasi-hutan-dan-lahan>
- <https://nasional.sindonews.com/read/1540255/15/rakernas-klhk-tantangan-pengelolaan-lingkungan-hidup-bakal-kian-berat-1582841174>
- <https://news.trubus.id/baca/35539/pakar-hukum-omnibus-law-lhk-menyederhanakan-prosedur-tanpa-mengubah-prinsip-lingkungan>
- <https://www.kabarbisnis.com/read/2897770/ini-upaya-bappenas-tekan-emisi-karbon>
- <https://www.beritasatu.com/nasional/603665/buka-rakernas-klhk-siti-nurbaya-jajaran-pusat-dan-daerah-harus-kompak>
- <https://www.beritasatu.com/nasional/603767/menteri-lhk-maraton-sosialisasi-ruu-ciptakerja>
- <http://m.suarariau.co/baca/berita/1582889961ruu-omnibus-law-menteri-lhk-siapkan-langkah-enforcement-lingkungan>
- <https://nasional.okezone.com/read/2020/02/28/337/2175887/omnibus-law-dibutuhkan-karena-ada-43-511-peraturan-saling-tumpang-tindih>
- <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/219653/berbagai-isu-strategis-bakal-dibahas-dalam-rakernas-kementerian-lhk>
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20200228/15/1206961/kumpulkan-jajaran-lhk-pusat-dan-daerah-menteri-lhk-sosialisasi-ruu-ciptakerja>
- https://sumsel.antaraneews.com/nasional/berita/1326954/pemegang-konsesi-diwajibkan-cegah-kawasan-konsesinya-dari-karhutla?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews
- <https://nasional.kontan.co.id/news/susun-rkp-2021-bappenas-dorong-pembangunan-di-tiga-sektor-ini?page=all>
- <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/GbmY7p4b-rakernas-klhk-sediakan-sesi-khusus-bahas-ruu-ciptakerja>
- <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/219653/berbagai-isu-strategis-bakal-dibahas-dalam-rakernas-kementerian-lhk>



LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

Madani